

Nurani Hakim Diuji

Pemerintah menyatakan tak memiliki afiliasi dan hubungan dengan para *buzzer*.

■ DIAN FATH RISALAH

JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara diminta menggunakan nurani keadilan terkait putusan dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Banyaknya kritik mulai soal tuntutan yang rendah hingga kejanggalan yang terjadi harus membuka nurani majelis hakim.

“Majelis hakim harus melalui tahap *ainul yakin, ilmu yakin, dan haqqul yakin*. Terlebih, putusannya harus mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah dan masyarakat yang makin ekstra kritis bahwa kasus penyerangan Novel penuh kejanggalan,” ujar mantan komisioner KPK Busyro Muqodas kepada *Republika*, Selasa (16/6).

Busyro menilai, majelis hakim sangat mungkin memberikan putusan yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang ‘hanya’ satu tahun penjara. Namun, kata dia, jika majelis hakim menemukan bukti yang tidak relevan dan bertentangan dengan telaah hukum pembuktian, majelis hakim bisa memutus bebas dari dakwaan atau tuntutan jaksa.

Busyro menilai, tragedi teror

terhadap Novel Baswedan sejak proses penyelidikan sudah memiliki banyak kejanggalan. Mulai 11 April 2017, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah didesak berbagai pihak, terutama masyarakat sipil, untuk membentuk tim independen gabungan Polri, Komnas HAM, KPK, dan unsur masyarakat sipil.

“Namun, sampai disidangkan kasus ini, tidak ada jawaban. Ini simbol negara tidak peka dan sekilas ingkar tanggung jawab. Malu kita dengan PM Mahathir,” ujar Busyro.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, harapan terakhir kini bergantung pada majelis hakim. Dia berharap hakim bisa memberikan hukuman dengan seadil-adilnya. “Karena pada dasarnya putusan hakim terikat pada dakwaan, bukan pada tuntutan. Istilahnya *ultrapetita*,” ujar dia.

Novel Baswedan mengatakan, sejak awal memang tidak pernah menaruh harapan pada proses hukum ini. “Karena saya tahu tidak ada iktikad baik, kecuali Presiden (Jokowi) memberi perhatian,” ujar dia.

Adapun tindakannya yang terus melawan dan protes, Novel menyatakan ia tidak mau membiarkan ke-

adilan diinjak-injak. “Wajah hukum yang bobrok dipertontonkan dan ini mencederai keadilan bagi kemanusiaan di masyarakat luas,” kata dia.

Novel pun menyesalkan materi nota pembelaan kedua pelaku penyerangan, yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. Terdakwa dalam nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya menyatakan, kerusakan mata Novel lebih disebabkan kesalahan pengobatan.

Menurut Novel, pembelaan dan pernyataan dua terdakwa tidak berdasar pengetahuan dan membabi buta. “Yang tangani saya adalah dokter mata spesialis kornea yang terpapar bahan kimia, yaitu Prof Donal Tan. Dalam beberapa *rating* yang bersangkutan adalah dokter kornea yang terbaik di dunia,” ujar Novel.

Bahkan, lanjut Novel, kedua matanya seharusnya buta karena serangan air keras. “Dan alhamdulillah satu masih bisa walaupun terbatas dan yang satunya sebelah kiri sudah diupayakan, tapi tidak tertolong juga,” ujar dia.

Bintang Emon didukung

Wadah Pegawai (WP) KPK turut menyampaikan dukungannya kepada komika Bintang Emon. Diketahui, Bintang Emon diserang di media sosial (*medsos*) *Twitter* dengan tuduhan memakai narkoba setelah mengunggah video berisi komentar dia mengenai tuntutan kepada pelaku

penyiram air keras terhadap Novel Baswedan.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo mengatakan, pernyataan Bintang Emon melalui videonya merupakan kritikan yang cerdas. Video tersebut juga jadi dukungan dan penyemangat bagi pegawai KPK. Yudi pun memahami terdapat risiko dari kritik yang disampaikan Bintang Emon tersebut.

“Namun, Mas Bintang Emon tentu saja tidak takut, apalagi dukungan masyarakat dan netizen juga mengalir kepada Bintang Emon karena mewakili suara mereka,” kata dia. Yudi berharap, kritikan yang dilakukan oleh Bintang Emon menjadi inspirasi bagi pegawai KPK dan semua pihak.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahril menegaskan, pemerintah tak memiliki afiliasi dan hubungan dengan para *buzzer* atau pendengung yang menyerang pengkritik pemerintah di media sosial. Pemerintah, kata dia, menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik.

Hal ini disampaikan menanggapai serangan dan tuduhan terhadap komika Bintang Emon setelah mengkritisi kasus Novel. “Pemerintah tidak ada hubungannya dengan *buzzer*. Apa pun afiliasi *buzzer* itu tidak ada korelasi dengan pemerintah,” ujar Donny, Selasa (16/6).

■ *dessy suciati saputri* *ed*: *mas alamil huda*